

Sistem dan Reformasi Ekonomi Indonesia

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M. Ec.



PENDAHULUAN

Modul ini membahas sistem ekonomi Indonesia yang dibandingkan dengan dua sistem ekstrem, yaitu kapitalis dan sosialis. Pembahasan menggunakan pendekatan historis yang dikaitkan dengan perkembangan ekonomi kontemporer. Secara khusus modul ini juga memberi gambaran umum perihal Sistem Ekonomi Pancasila, sebagai Sistem Ekonomi khas Indonesia, beserta Sistem Ekonomi Kerakyatan sebagai salah satu sub-sistemnya. Pembahasan menggunakan pendekatan perbandingan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis-Neo Liberal yang saat ini telah berkembang di Indonesia. Modul ini juga menguraikan perlunya reformasi (sistem) ekonomi pasca krisis moneter 1997/1998 yang coraknya makin diatur oleh IMF dan Bank Dunia melalui Program Penyesuaian Struktural-nya. Krisis moneter tersebut telah menjadi bukti kuatnya daya tahan ekonomi rakyat di saat krisis.

Setelah mempelajari modul ini secara umum Anda diharapkan dapat menjelaskan Sistem Ekonomi Indonesia dan perlunya reformasi ekonomi Indonesia menuju sistem ekonomi yang lebih demokratis.

Secara khusus setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu:

1. menjelaskan variasi (perbedaan) sistem ekonomi dan sejarah perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia;
2. merumuskan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia saat ini beserta gagasan-gagasan pengembangannya;
3. menjelaskan keterkaitan antara Sistem Ekonomi Pancasila dan Sistem Ekonomi Kerakyatan;
4. menjelaskan latar belakang perlunya reformasi ekonomi Indonesia pasca krisis moneter 1997/1998;
5. menerangkan daya tahan dan peranan ekonomi rakyat di saat krisis.

KEGIATAN BELAJAR 1**Sistem Ekonomi****A. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI**

Setiap kelompok masyarakat (pada tataran yang lebih kompleks membentuk negara bangsa) pasti memiliki sebuah sistem ekonomi untuk mengatasi beberapa persoalan, seperti; 1) barang apa yang seharusnya dihasilkan; 2) bagaimana cara menghasilkan barang itu; dan 3) untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut akan menentukan sistem ekonomi sebuah negara (Hudiyanto, 2002).

Penentuan sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang diyakini oleh negara. Ideologi tertentu akan melahirkan sistem ekonomi tertentu pula karena pada dasarnya, negara melalui ideologinya telah memiliki cara pandang tertentu untuk memandang dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Setiap sistem ekonomi membutuhkan sekumpulan peraturan, ideologi yang mendasarinya, menjelaskan peraturan tersebut dan keyakinan individu yang akan membuatnya terus dijalankan (Robinson, 1962:18)

Ada berbagai sistem ekonomi yang berkembang di dunia. Namun, pada dasarnya kita dapat membaginya menjadi dua titik ekstrim, yaitu Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis. Pada perkembangannya, ketika banyak negara merasa kedua sistem tersebut tidak dapat menjawab persoalan-persoalan mereka, maka muncul Sistem Ekonomi Campuran yang menggabungkan kedua sistem ekonomi sebelumnya. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas ketiga sistem ekonomi tersebut satu per satu.

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Kapitalis muncul pada abad ke-17 ketika dominasi gereja di Eropa mulai runtuh. Dominasi gereja, yang mendoktrinkan kepentingan gereja di atas segala kepentingan, diruntuhkan oleh pandangan yang menekankan pada liberalisme, individualisme, rasionalisme atau intelektualisme, materialisme dan humanisme. Pemikiran-pemikiran tersebut menjadi dasar Sistem Ekonomi Kapitalis. Pemikiran liberalisme meletakkan

kebebasan individu sebagai hal yang paling utama. Rasionalisme mengajarkan bahwa peranan rasio (pikiran) lebih penting daripada perasaan. Materialisme adalah paham yang menyatakan bahwa hakikat kebenaran adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara empiris, yaitu diraba, didengar, dan dirasa. Sementara itu humanisme adalah paham yang menyatakan bahwa bagi manusia yang penting adalah kehidupan di dunia ini, hidup sesudahnya di luar jangkauan manusia sehingga tidak perlu dipikirkan (Hudiyanto, 2002).

Jika sebelumnya gereja dengan doktrin-doktrinnya menghalang-halangi umat Kristen untuk mengumpulkan kekayaan karena kekayaan sepenuhnya milik gereja, maka setelah keruntuhannya masyarakat Eropa pada zaman itu mulai benar-benar memikirkan penimbunan kekayaan. Pada saat yang sama terjadi perubahan fokus mendapatkan kekayaan. Jika sebelumnya, mereka sangat tergantung dengan perdagangan maka setelah kemunculan penemuan teknologi baru seperti mesin uap, mereka beralih pada industri. Modal yang semula dialokasikan pada perdagangan dialihkan pada pembangunan industri. Pada masa itulah muncul Adam Smith (1776) yang menjadi peletak ideologi kapitalisme.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis:

a. *Penjaminan atas hak milik perseorangan*

Hak milik pribadi adalah hal yang paling penting dalam kapitalisme. Setiap orang berhak menimbun kekayaan pribadi sebesar-besarnya tanpa mengindahkan posisi orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama.

b. *Mementingkan diri sendiri (self interest)*

Karena menekankan individualisme, maka dalam Sistem Ekonomi Kapitalis setiap individu sepenuhnya dibebaskan berorientasi pada diri sendiri. Segala aktivitas ekonomi dan sosial yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan diri sendiri. Para kapitalis mempercayai kehadiran “tangan-tangan gaib” (*invisible hands*) yang akan mempertemukan setiap kepentingan individu tersebut dalam sebuah titik keseimbangan (*equilibrium*).

c. *Pemberian kebebasan penuh*

Paham liberalisme yang menjadi dasar pemikiran kapitalisme memungkinkan setiap pihak memiliki kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas ekonomi. Campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi dibatasi hanya sebagai penyedia fasilitas dan pengatur lalu

lintas sehingga semua orang dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan lancar. Para kapitalis percaya jika setiap individu mendapatkan kepuasan maka akan tercipta kemakmuran dalam masyarakat (*harmony of interest*). Pemberian kebebasan kepada para pelaku ekonomi ini diyakini dapat diikuti dengan ketertiban dalam kehidupan karena ada “tangan-tangan gaib” yang membawa pada titik keseimbangan.

d. *Persaingan bebas (free competition)*

Dalam sistem kapitalis, persaingan antarpelaku ekonomi di masyarakat dimungkinkan. Persaingan dapat terjadi antarpemula yang dapat memberikan kualitas terbaik kepada pembeli. Sebaliknya beberapa pembeli dapat saling bersaing untuk memberikan harga terbaik. Secara umum pasar diibaratkan sebagai pasar persaingan sempurna, yaitu situasi ketika posisi tawar masing-masing produsen dan konsumen seimbang, sehingga pembeli dan penjual tidak dapat menjadi penentu harga (*price setter*) tetapi hanya bertindak sebagai pengambil harga (*price taker*). Harga yang disepakati adalah harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

e. *Harga sebagai penentu (price system)*

Para kapitalis sangat percaya pada mekanisme pasar yang bekerja menentukan harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Dalam kondisi apa pun negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap pasar. Jika pada satu waktu penawaran berlebihan sehingga mengakibatkan merosotnya harga, maka negara diminta diam saja karena mekanisme pasar dengan sendirinya akan menentukan harga keseimbangan baru.

f. *Peran negara minimal*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada Sistem Ekonomi kapitalis mekanisme pasarlah yang satu-satunya diyakini baik dan boleh bekerja di pasar. Oleh karena itu negara memiliki peran yang sangat minim. Negara hanya menjaga keamanan dan ketertiban, menetapkan hak-hak kekayaan pribadi, menjamin perjanjian kedua belah pihak ditaati, menjaga persaingan tanpa hambatan, mengeluarkan mata uang, dan menyelesaikan persengketaan pihak buruh dan pemilik modal.

Sistem Ekonomi Kapitalis memberikan kebebasan individu untuk berusaha mendapatkan kekayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kebebasan tersebut mendorong individu melakukan

berbagai inovasi ekonomi dan teknologi yang mendorong kemajuan. Namun, kapitalisme membuat pihak yang tidak memiliki posisi tawar (modal) yang sama dengan pihak lain secara struktural tidak akan dapat bekerja dalam pasar, sehingga ia tidak dapat mencapai kemakmuran. Padahal posisi tawar yang tidak seimbang inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan nyata. Akibatnya terjadi monopoli, pasar hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Apabila monopoli terjadi maka terjadi ketimpangan kemakmuran. Pihak yang dapat bekerja di pasar akan mendapatkan kemakmuran yang besar sedangkan sebaliknya pihak yang “tersingkir” dari pasar tidak akan sejahtera. Jika semua orang berorientasi pada diri mereka sendiri, maka kepentingan publik akan terabaikan, misalnya pembangunan jembatan umum, rumah sakit, dan jalan raya tidak akan dilakukan karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi.

2. Sistem Ekonomi Sosialis

Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis sesungguhnya telah muncul sejak abad ke-16 yang disebut sebagai sosialisme utopis. Polarisasi yang tajam antara si kaya dan si miskin dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat Inggris pada abad ke-16 memunculkan berbagai kritik, yang konsepnya disebut sebagai “sosialisme utopia”. Gagasan ini merupakan tanggapan langsung pada tahap awal perkembangan kapitalisme, termasuk yang sebelum dikonsepsikan secara sistematis oleh Adam Smith pada tahun 1776. Tokoh-tokoh penganjur sosialisme utopia di antaranya adalah Thomas More (1478-1535), Tomasso Campanella (1568-1639), Francis Bacon (1560-1626), dan dikembangkan oleh Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882).

Sistem Ekonomi Kapitalis yang diterapkan di Eropa membawa kemakmuran bagi masyarakat, walaupun kemakmuran tersebut tidak bertahan lama. Pada awal abad ke-20, terjadi kondisi kelesuan ekonomi (*malaises*). Mekanisme pasar yang diharapkan menyelesaikan depresi ekonomi tersebut ternyata tidak kunjung terjadi. Maka kemudian muncul Sistem Ekonomi Sosialis yang pada abad ke-16 telah dipikirkan dan diyakini dapat menjawab masalah ekonomi saat itu.

Sistem Ekonomi Sosialis dilandasi oleh falsafah kolektivisme dan organisme. Kolektivisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa setiap orang adalah warga masyarakat. Oleh karena masyarakat adalah sebuah kesatuan tersendiri maka kepentingan masyarakat harus lebih dahulu diutamakan

daripada kepentingan pribadi. Organisme adalah pandangan bahwa selain kepentingan dan kebutuhan masyarakat, negara sebagai sebuah kesatuan juga memiliki kepentingan dan kebutuhan. Oleh karena itu, negara sebaiknya berperan besar dalam sistem ekonomi untuk menjamin pemenuhan kepentingan dan kebutuhan setiap warga negara (Hudiyanto, 2002).

Dalam Sistem Ekonomi Sosialis ini, pemerintah sangat berperan untuk menentukan jalannya perekonomian, atau umum dikenal sebagai perencanaan terpusat atau *centralized planning* sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak (Suandi, 2005).

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis adalah:

- a. Negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor produksi. Pemilikan bersama ini dimaksudkan agar semua faktor produksi diarahkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama bukan berorientasi terhadap keuntungan pribadi.
- b. Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan (*production for needs*). Negara akan mengatur semua produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya barang dan jasa yang bernilai ekonomi saja karena seluruh kegiatan ekonomi tidak diarahkan untuk menimbun kekayaan individu tetapi kesejahteraan bersama.
- c. Perencanaan ekonomi (*economic planning*). Negara melakukan perencanaan yang ketat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam sistem ini mekanisme pasar tidak lagi berlaku karena negara yang menentukan semua harga (*price setter*).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sistem ini ingin melindungi semua pihak, terutama kelompok marjinal yang tidak memiliki faktor produksi. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar semua masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang setara. Namun, secara umum sistem ini menghambat ekspresi dan mengurangi semangat orang untuk bekerja dan berprestasi, yang pada akhirnya makin menurunkan kreativitas dan produktivitas masyarakat. Negara dan perencanaan ekonomi yang sentralistik tidak dapat menjamin bahwa produksi dan distribusi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat karena pada tingkatan tertentu negara tidak memiliki kemampuan produksi dan distribusi sebesar kebutuhan masyarakat.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Kemunculan Sistem Ekonomi Sosialis dianggap terlalu ekstrim karena mengharuskan pengambilalihan kekayaan individu menjadi kekayaan negara. Oleh karena itu ditempuh jalan tengah yang menyatukan kebaikan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis. John Maynard Keynes memunculkan pemikiran bahwa selain mendatangkan manfaat, kapitalisme juga memunculkan eksek yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, negara berfungsi mengatasi eksek berupa pengangguran dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Sistem ekonomi gagasan Keynes, yang dikenal sebagai Sistem Ekonomi Campuran, telah melahirkan negara kesejahteraan (*Welfare State*) seperti yang dipraktikkan negara-negara Eropa Barat saat ini.

Welfare State adalah suatu negara yang ingin menciptakan demokrasi seluas-luasnya seperti kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan, penguasaan teknologi, pendidikan dan sebagainya. Negara memiliki kewajiban menanggulangi penyebab kemiskinan struktural yang menghalangi kelompok-kelompok tertentu masuk ke dalam pasar.

Tindakan yang dilakukan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga hal:

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk operasional negara. Dalam hal-hal tertentu, tindakan ini dilakukan untuk mendistribusikan pendapatan.
- b. Penarikan pajak, biasanya yang dikenakan pajak progresif sehingga semakin besar kekayaan seseorang maka semakin besar pula harta yang diberikan kepada negara. Pajak ini digunakan untuk melakukan tindakan yang ketiga.
- c. Subsidi diberikan kepada para pihak yang membutuhkan sehingga kemiskinan struktural dapat diselesaikan dan distribusi pendapatan dapat terjadi.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

Sistem Perekonomian Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh Sistem Ekonomi Kolonial Belanda yang selama 350 tahun berkuasa atas ekonomi Indonesia. Pada awal kedatangannya di Indonesia, kolonial tidak datang sebagai penjajah fisik namun penjajah ekonomi. Dengan organisasi perdagangannya bernama VOC, mereka memonopoli pasar rempah-rempah yang pada masa itu merupakan komoditi andalan nusantara. Mereka menggunakan kekerasan senjata untuk menguasai rempah-rempah.

Ketika tahun 1799 VOC bangkrut dan bubar, pemerintah Belanda melaksanakan sistem tanam paksa (*culture stelsel*) untuk menutup defisit anggaran kerajaan akibat perang melawan berbagai perlawanan di Nusantara. Sistem tanam paksa yang berlangsung selama lebih dari satu abad ini mendatangkan banyak keuntungan di pihak kerajaan Belanda tetapi mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat Nusantara. Namun, saat mulai berkembang liberalisme di Eropa, kebijakan tanam paksa ini menuai banyak kritik, sehingga pemerintah Belanda mengubahnya menjadi Sistem Ekonomi Kapitalis-Liberal.

Melalui Undang-undang Agraria tahun 1870, pemerintah Belanda mengundang sektor swasta untuk menyewa lahan perkebunan dalam jangka waktu yang lama. Lahan perkebunan yang semula dikendalikan pemerintah Belanda diambil alih oleh swasta, sedangkan pemerintah mendapatkan keuntungan dari pajak perseroan dan pajak pendapatan sektor swasta. Persoalan baru muncul ketika perkebunan swasta dan perkebunan rakyat menanam jenis tanaman yang sama akibatnya perkebunan rakyat sulit bersaing karena memiliki modal yang lebih kecil dibandingkan sektor swasta (Mubyarto, 2002).

Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin bangsa berusaha merumuskan kembali Sistem Ekonomi Indonesia yang dianggap ideal dengan kondisi bangsa. Muhammad Hatta mengemukakan sebuah konsep tentang Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu Sistem Ekonomi Kerakyatan. Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, semua aktivitas ekonomi harus disatukan dalam organisasi koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan. Hanya dalam asas kekeluargaan dapat diwujudkan prinsip demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, sedangkan pengelolaannya dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002). Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan inilah yang kemudian dituangkan dalam UUD 1945 sebagai dasar sistem perekonomian nasional.

Sistem ekonomi seperti yang dikonsepsikan oleh Muhammad Hatta tersebut, ternyata tidak langsung berhasil dijalankan oleh pemerintahan Indonesia. Beberapa waktu setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami masa-masa sulit hingga pada puncaknya terjadi perpecahan pemimpin nasional ditandai dengan mundurnya Muhammad Hatta pada tahun 1956. Sejak saat itu Sukarno memegang kekuasaan yang sangat besar, sehingga Sistem Ekonomi Etatisme berjalan di Indonesia. Negara mengendalikan

sistem produksi dan distribusi. Hiperinflasi hingga 650 persen yang terjadi pada tahun 1966 menghentikan sistem tersebut. Kekacauan sosial politik yang kemudian terjadi membuat Sukarno praktis tidak mampu melakukan kebijakan apapun untuk memperbaiki keadaan.

Setelah rejim Orde Lama ditumbangkan oleh peristiwa berdarah 1966, rejim Orde Baru muncul dengan membawa sistem ekonomi yang baru yang ternyata juga tidak sepenuhnya sesuai dengan dasar sistem ekonomi yang termuat dalam UUD 1945. Sistem Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru bersandar pada “trilogi pembangunan“, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan. Meskipun pemerintah selalu mengklaim dirinya tidak menerapkan Sistem Ekonomi Kapitalis, tetapi pada praktiknya Indonesia telah melakukan berbagai liberalisasi ekonomi yang semakin memarjinalisasi peranan ekonomi rakyat.

C. PERANGKAT SISTEM EKONOMI DALAM UUD 1945

Seperti yang telah disebutkan di atas, Muhammad Hatta telah mengagas Sistem Ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam UUD 1945 pasal 33:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal tersebut, tercantum dasar demokrasi ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan prinsip tersebut adalah koperasi. Konsep Sistem Ekonomi yang berdasarkan pasal tersebut menempatkan negara pada pelindung dan pembangun perekonomian yang dikuasai dan mampu dikendalikan oleh rakyat.

D. SISTEM EKONOMI INDONESIA DEWASA INI

Dasar negara Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi yang dikonsepsikan adalah Ekonomi Kerakyatan (ekonomi yang dikuasai oleh rakyat), tetapi kenyataannya aktivitas ekonomi yang berlangsung saat ini mencerminkan Sistem Ekonomi Kapitalis, sehingga saat ini yang terjadi adalah dualisme ekonomi.

Dualisme ekonomi mengacu pada pemikiran J.H. Boeke yang menggambarkan adanya dua keadaan yang amat berbeda dalam suatu masyarakat, yang hidup berkembang secara berdampingan. Keadaan pertama bersifat “superior”, sedangkan yang lainnya bersifat “inferior”, seperti halnya adanya cara produksi modern berdampingan dengan cara produksi tradisional, antara orang kaya dengan orang miskin tak berpendidikan, dan keadaan lain yang kontras dalam satu masa dan tempat (Hudiyanto, 2002).

Mengacu pada pengertian tersebut, kiranya tidak sulit mengamati bekerjanya dualisme ekonomi dalam Sistem Ekonomi Indonesia saat ini. Dualisme ekonomi di Indonesia tidak hanya mewujud sebagai akibat perbedaan taraf pengembangan teknologi, melainkan tampak sebagai perbedaan konsep nilai (falsafah), ideologi, dan sosial-budaya, yang mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi.

Di desa-desa (pedalaman) dan di sebagian masyarakat kota yang masih menganut kolektivisme banyak dijumpai tradisi yang memunculkan sistem ekonomi tertentu, yang tidak selalu sejalan dengan sistem ekonomi yang dominan. Ada sistem arisan, “sambatan” (kerja bakti), “nyumbang”, dan sistem pertukaran lokal (sebagian subsistem), yang masih berkembang meskipun sistem-sistem produksi dan keuangan modern makin berkembang pesat. Di sisi lain, perkembangan sektor ekonomi formal di pusat-pusat perkotaan tetap saja tidak mampu menampung banyaknya tenaga kerja, yang akhirnya berusaha di sektor informal. Dalam struktur ekonomi nasional pun perbedaan (konfigurasi) antara pelaku ekonomi konglomerat dan pelaku ekonomi rakyat masih terlihat jelas. Masing-masing menganut sistem nilai yang berbeda, yang memunculkan perbedaan sistem ekonomi yang terbentuk.

Derajat hubungan (ketergantungan) antara kedua sistem (pelaku) umumnya terjadi dalam pola yang tidak seimbang. Dalam hal ini, sistem (pelaku) ekonomi superior (dominan) cenderung mensubordinasi sistem (pelaku) ekonomi inferior karena kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan SDM yang dikuasai pelaku ekonomi di sektor modern tersebut.

Namun, tetap saja ada resistensi dari pelaku ekonomi tradisional di pedesaan yang berupaya mengembangkan tatanan sosial-ekonomi yang sesuai dengan sistem nilai dan sistem sosial-budaya mereka. Teori dualisme ekonomi dalam konteks Indonesia saat ini membantu untuk menganalisis dialektik hubungan ekonomi antarpelaku ekonomi. Dalam perkembangannya, antara dua keadaan yang kontras tersebut tidak lagi dapat berdampingan secara sejajar, melainkan satu sistem tersubordinasi oleh sistem yang dominan.

Kenyataan model dualisme ekonomi ini berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan penyusunan strategi pembangunan. Dalam struktur dualistik yang timpang, pengaruh kebijakan ekonomi dapat berbeda (*trade-off*), sehingga dibutuhkan kebijakan afirmatif (pemihakan) kepada pelaku ekonomi yang kecil, rentan, dan miskin. Jika tidak, kebijakan yang didesain secara makro-deduktif cenderung selalu menguntungkan (makin memakmurkan) pelaku ekonomi besar (sektor modern), yang membawa korban pada kemerosotan kesejahteraan pelaku ekonomi rakyat yang umumnya bergerak di sektor informal, pertanian, dan di wilayah pedesaan (Hamid, 2005).

Situasi dualisme ekonomi tersebut tidak dapat dibiarkan terjadi terus-menerus. Bangsa Indonesia harus segera mengambil langkah konkret dengan mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi sosial dan kultural bangsa untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang saat ini mendera.

E. SISTEM EKONOMI KAPITALIS-NEO LIBERAL

Sistem Ekonomi Kapitalis yang muncul sejak abad ke-17 telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Jika sebelumnya sistem ekonomi bekerja di bawah lingkup negara (meskipun negara tidak diperbolehkan campur tangan) maka sekarang kapitalisme telah bergerak melampaui batas-batas wilayah negara.

Sistem Ekonomi Kapitalis-Neo Liberal sering kali ditandai dengan globalisasi. Awal tahun 1990-an arus pemikiran tentang globalisasi ekonomi mewarnai hampir seluruh dunia. Terminologi yang berkaitan dengan globalisasi ini, seperti negara tanpa batas, liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas, integrasi ekonomi dunia, dan sebagainya menjadi semacam dogma seolah itulah yang diyakini yang akan membawa dunia pada kemajuan ekonomi, hilangnya kemiskinan, serta mengecilnya kesenjangan antarnegara.

Upaya ke arah globalisasi ini sangat didukung negara-negara adikuasa ekonomi, yang memang sudah akrab dengan liberalisasi ekonomi berabad lebih awal dibanding negara berkembang.

Menurut Wyane Ellwood, proses globalisasi sudah mulai sejak lima abad yang lalu (abad ke-16) dengan dimulainya era kolonialisme Eropa. Perkembangan mutakhir adalah munculnya integrasi kawasan Asia Pasifik melalui dibentuknya *Asia-Pacific Economic Forum* (APEC) yang dimotori negara-negara seperti Australia, Amerika, dan Kanada. Kemudian *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) pada tahun 1995 diperluas menjadi *General Agreement on Trade and Service* (GATS) dan dibentuk organisasi yang kini dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO). WTO didasari pada asumsi bahwa perdagangan bebas dunia akan meningkatkan perdagangan dunia. Berbagai perangkat organisasi ekonomi dunia itu diharapkan akan membantu percepatan perwujudan globalisasi untuk mengangkat kemakmuran dunia.

Namun di penghujung tahun 1990-an gerakan berlawanan arah dengan kecenderungan globalisasi justru yang menguat. Globalisasi kini terus digugat banyak negara. Impian untuk percepatan pembangunan ekonomi dan penghapusan kemelaratan ternyata tidak mewujudkan. Situasi yang ada justru melahirkan keadaan sebaliknya, dan ketimpangan negara kaya-miskin dinilai makin membesar. Perusahaan besar dan negara kaya mengambil untung lebih besar dari globalisasi ekonomi tersebut. Diperkirakan 25 persen perdagangan dunia berlangsung dalam perusahaan global atau *intra-company trade*. Porsi yang sama juga terjadi antara negara maju yang tergabung dalam *European Community* (EC) dan NAFTA. Hanya sebagian kecil dari perdagangan dunia ini yang bisa dinikmati negara-negara berkembang. Hal yang sama juga terjadi dalam liberalisasi finansial, yang dikendalikan oleh lembaga keuangan internasional serta dikomando negara-negara adikuasa ekonomi dan pemilik modal di pasar uang dunia (Suandi, 2005).

Indonesia sesungguhnya turut terjerat dalam Sistem Ekonomi Kapitalis-Neo Liberal ini. Melalui kerangka peminjaman utang luar negeri untuk membiayai pembangunan, Indonesia terjebak dalam siklus pembayaran utang yang tiada habisnya. Di lain pihak, dengan dalih bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mendatangkan keuntungan dari perdagangan dunia, Indonesia justru dibebani dengan berbagai peraturan yang justru merugikan kepentingan nasional. Situasi ini memaksa Indonesia

menemukan sistem ekonomi yang mampu menghadapi tantangan penjajahan ekonomi ini.

F. SISTEM EKONOMI PANCASILA

Konsep Sistem Ekonomi Pancasila mulai dikembangkan lebih serius sejak Seminar Nasional di Universitas Gadjah Mada tahun 1980. Pada waktu itu Ekonomi Pancasila tidak sekadar dimaknai sebagai sebuah Sistem Ekonomi, seperti konsep Sistem Ekonomi Pancasila-nya Emil Salim (1966), melainkan mulai digagas sebagai sebuah ilmu ekonomi (alternatif). Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi (terutama dari UGM) pada waktu itu merupakan refleksi kritis terhadap sistem dan ilmu ekonomi yang “keliru”, serta mulai menyimpang dari jati diri dan realitas sosial-ekonomi bangsa (rakyat) Indonesia.

Gagasan ini telah memicu polemik terbuka yang melibatkan tokoh-tokoh ekonomi/politik dalam dan luar negeri (*William Liddle*, *Peter Mc. Cawley*, jurnal BIES (*Bulletin of Indonesian Economic Studies*), dan FEER (*Far Eastern Economic Review*). Namun, perhatian terhadap gagasan Sistem Ekonomi Pancasila makin melemah karena tidak didukung oleh rezim Orde Baru, yang ditopang teknokrat ekonomi berhaluan Neo-Liberal.

Sistem Ekonomi Pancasila digali berdasar pemikiran bahwa Sistem Ekonomi sangat terkait dengan ideologi, sistem nilai dan sosial-budaya (kelembagaan) masyarakat di mana sistem itu dikembangkan. Mubyarto menyatakan dengan jelas bahwa ekonomi Pancasila merupakan Sistem Ekonomi yang khas (berjati-diri) Indonesia, yang digali dan dikembangkan berdasar kehidupan ekonomi riil (*real-life economy*) rakyat Indonesia. Ekonomi Pancasila berpijak pada kombinasi antara gagasan-gagasan normatif dan fakta-fakta empirik yang telah dirumuskan oleh *founding fathers* bangsa dalam wujud sila-sila dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal (ekonomi) UUD 1945 (asli), yaitu pasal 27 (ayat 2), 31, 33, dan 34. Ekonomi Pancasila adalah Sistem Ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila, yang terwujud dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik (ber-Ketuhanan), ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus, terdapat lima prinsip penerapan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu: *Pertama*, roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh

rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. *Kedua*, ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. *Ketiga*, semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. *Keempat*, demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan: koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. *Kelima*, keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hamid, 2005).

G. SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

Bagaimana dengan ekonomi rakyat sendiri? Ekonomi rakyat sering disebut dengan berbagai istilah lain yang terkait, yaitu perekonomian rakyat ataupun ekonomi kerakyatan. Ini mengandung makna yang spesifik. Jika ekonomi rakyat menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat lebih menunjuk pada objek atau situasinya. Makna yang lebih luas ada dalam ekonomi kerakyatan yang mencerminkan suatu bagian dari sistem perekonomian. Ekonomi kerakyatan ini dapat dikatakan sebagai subsistem dari Sistem Ekonomi Pancasila.

Jika melihat secara harafiah, kata “rakyat” merujuk pada semua orang dalam suatu wilayah atau negara. Dengan demikian jika dilihat dari terminologi ini, maka yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian dalam konteks riil yang berkembang, istilah ekonomi rakyat muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap perekonomian nasional yang bias kepada unit-unit usaha besar. Oleh karena itu, makna ekonomi rakyat lebih merujuk pada ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia yang umumnya masih tergolong ekonomi lemah, bercirikan subsistem (tradisional) dengan modal dan tenaga kerja keluarga serta teknologi sederhana.

Ekonomi rakyat dibedakan dari ekonomi konglomerat dalam sifatnya yang tidak kapitalistik. Ekonomi konglomerat yang kapitalistik memomorsatukan pengejaran keuntungan tanpa batas dengan cara bersaing, kalau perlu saling mematikan (*free fight competition*). Sebaliknya, dalam perekonomian rakyat semangat yang lebih menonjol adalah bekerja sama,

karena hanya melalui kerja sama berdasar asas kekeluargaan tujuan usaha dapat dicapai (Mubyarto, 1998: 40-46).

Bagaimana dengan pengertian Ekonomi Kerakyatan yang banyak menjadi wacana dalam pembangunan ekonomi Indonesia satu dasawarsa terakhir ini? Tidak mudah membuat suatu batasan tentang ekonomi kerakyatan dengan hanya melihat dari sisi harafiah atau terminologi bahasanya saja karena kalau dilihat dari pelaku-pelaku ekonomi yang ada, baik itu unit usaha kecil, menengah, besar ataupun konglomerat, semuanya adalah "rakyat Indonesia". Artinya aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi itu juga dilakukan oleh rakyat namun napas dari ekonomi kerakyatan belakangan ini tidaklah demikian. Kesan yang kuat adalah adanya keinginan agar dalam pembangunan ekonomi keterlibatan rakyat banyak diperbesar atau ditingkatkan. Dengan dasar itu, maka dapat dikatakan bahwa makna "ekonomi kerakyatan" tersebut adalah suatu perekonomian yang orientasinya pada keterlibatan orang banyak dalam aktivitas ekonomi, baik aktivitas produksi, konsumsi, maupun distribusi (Hamid dan Hendrianto, 2000).

Ginandjar Kartasasmita, dalam pidato penerimaan gelar *Doctor Honoris Causa* dari UGM (April 1995) menyuratkan bahwa yang dimaksud ekonomi rakyat adalah: "ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia". Dengan pengertian di atas maka yang diharapkan adalah bahwa aktivitas-aktivitas di sektor industri, pertanian, pertambangan, jasa-jasa, dan sebagainya, melibatkan rakyat banyak untuk melakukannya. Ada kebebasan masyarakat untuk ikut bekerja atau menjadi pengusaha pada sektor-sektor itu, atau di lapangan-lapangan usaha yang ada.

Tidak ada sektor produksi yang diperuntukkan bagi satu atau segelintir pengusaha. Mereka yang terlibat dalam aktivitas itu berhak pula untuk memperoleh penghasilan ataupun upah yang layak untuk membiayai konsumsinya. Artinya, berbagai penghasilan atau keuntungan dari segala penerimaan aktivitas ekonomi bisa dinikmati oleh sebagian besar rakyat yang terlibat dalam produksi itu. Termasuk dalam pengertian ini adalah adanya suatu pola distribusi yang adil sebagai akibat adanya aktivitas produksi di atas. Jadi, perkembangan produksi atau output nasional yang terus meningkat, yang tercermin dari melajunya PDB, selayaknya dinikmati oleh rakyat banyak tersebut (Hamid, 2005).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi?
- 2) Jelaskan perbedaan Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Campuran!
- 3) Jelaskan pemahaman Anda tentang Sistem Ekonomi Pancasila!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sistem ekonomi adalah cara sebuah negara untuk mengatur jenis produk yang dihasilkan, cara menghasilkan/memproduksi barang, dan cara mendistribusikan barang tersebut kepada masyarakat.
- 2) Perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan campuran adalah:
 - a. Sistem ekonomi kapitalis
Sistem ini didasari oleh pandangan liberalisme, individualisme, rasionalisme atau intelektualisme, materialisme, dan humanisme.
 - b. Sistem ekonomi sosialis
Sistem ini dilandasi oleh falsafah kolektifisme dan organisme.
 - c. Sistem ekonomi campuran
Sistem ini merupakan penyatuan kebaikan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang melahirkan negara kesejahteraan (*welfare state*).
- 3) Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pemikiran bahwa sistem ekonomi sangat terkait dengan ideologi, sistem nilai, dan sosial budaya masyarakat tempat sistem ini dikembangkan.



RANGKUMAN

Sistem ekonomi adalah cara sebuah negara untuk mengatur jenis produk yang dihasilkan, menghasilkan barang itu dan bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Penentuan sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang diyakini oleh negara. Pada dasarnya kita dapat membaginya menjadi dua titik ekstrim, yaitu Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis.

Sistem Ekonomi Kapitalis didasari oleh pandangan liberalisme, individualisme, rasionalisme atau intelektualisme, materialisme dan humanisme. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis adalah penjaminan atas hak milik perseorangan, mementingkan diri sendiri (*self interest*), pemberian kebebasan penuh, persaingan bebas (*free competition*), harga sebagai penentu (*price system*), dan peran negara yang minimal.

Sistem Ekonomi Sosialis dilandasi oleh falsafah kolektivisme dan organisme. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis adalah: negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor produksi, produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan (*production for needs*), perencanaan ekonomi (*economic planning*) dilakukan oleh negara.

Sistem Ekonomi Sosialis dan Kapitalis dianggap terlalu ekstrim sehingga John Maynard Keynes mengajukan Sistem Ekonomi Campuran yang melahirkan negara kesejahteraan (*welfare state*) seperti yang dipraktikkan negara-negara Eropa Barat saat ini. Dalam sistem ini tindakan yang dilakukan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga hal; melakukan pembelian barang dan jasa untuk operasional negara, penarik pajak dan pemberi subsidi kepada pihak yang membutuhkan.

Ketika Indonesia merdeka, para pemimpin Indonesia berusaha merumuskan kembali Sistem Ekonomi Indonesia yang dianggap ideal dengan kondisi bangsa. Muhammad Hatta mengemukakan sebuah konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan. Tetapi karena gejolak politik yang membuat Presiden Sukarno sangat berkuasa maka Indonesia menerapkan Sistem Ekonomi Etatisme (dominasi negara). Setelah rezim Orde Lama ditumbangkan, pemerintah Orde Baru bersandar pada “trilogi pembangunan“, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan. Meskipun pemerintah selalu mengklaim dirinya tidak menerapkan Sistem Ekonomi Kapitalis, tetapi pada praktiknya Indonesia telah melakukan berbagai liberalisasi ekonomi yang tidak berpihak pada ekonomi rakyat.

Saat ini sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia bersifat dualisme. Pada satu sisi pemerintah mengambil kebijakan ala Sistem Kapitalisme tetapi sebagian besar rakyat mempraktikkan Sistem Ekonomi Kerakyatan. Kenyataan model dualisme ekonomi ini berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan penyusunan strategi pembangunan. Sudah seharusnya kita menggunakan Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila digali berdasar pemikiran bahwa sistem ekonomi sangat terkait dengan ideologi, sistem nilai dan sosial-budaya (kelembagaan) masyarakat di mana sistem itu dikembangkan. Terdapat lima prinsip penerapan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu: *Pertama*, roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. *Kedua*, ada kehendak kuat

warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. *Ketiga*, semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. *Keempat*, demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan: koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. *Kelima*, keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hamid, 2005).



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Salah satu ciri Sistem Ekonomi Kapitalis adalah
 - A. kualitas barang sebagai penentu
 - B. jaminan hak milik pribadi
 - C. pembatasan kebebasan berusaha
 - D. bentuk persaingan diatur pemerintah

- 2) Falsafah yang dianut baik dalam Sistem Ekonomi Kapitalis maupun Sistem Ekonomi Sosialis adalah
 - A. kolektivisme
 - B. individualisme
 - C. liberalisme
 - D. materialisme

- 3) Sistem Ekonomi yang demokratis merupakan pengertian dari
 - A. ekonomi rakyat
 - B. ekonomi kerakyatan
 - C. perekonomian rakyat
 - D. ekonomi Pancasila

- 4) Salah satu landasan penerapan Sistem Ekonomi Pancasila adalah
 - A. sentralisasi ekonomi
 - B. demokrasi ekonomi
 - C. pertumbuhan ekonomi
 - D. tujuan ekonomi

- 5) Bangun usaha yang berasas kekeluargaan dan sesuai dengan penerapan demokrasi ekonomi adalah
- A. Koperasi
 - B. Perseroan Terbatas
 - C. Firma
 - D. BUMN

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Reformasi Ekonomi

A. KRISIS MONETER INDONESIA

Pada tahun 1997-1998 yang lalu Indonesia mengalami krisis moneter yang membawa perubahan drastis pada perekonomian kita. Krisis moneter tersebut ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis. Krisis moneter ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Secara sederhana krisis moneter yang dialami Indonesia disebabkan oleh meningkatnya permintaan valuta asing, khususnya dolar AS, yang melebihi penawaran.

Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tersebut terjadi karena beberapa hal, baik berasal dari dalam maupun dari luar negara. Penyebab internal krisis adalah (Rachbini, 2001): *pertama*, defisit transaksi berjalan Indonesia yang cenderung membesar dari tahun ke tahun. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah menjadi semakin kuat manakala beban pembayaran terhadap impor dan kewajiban terhadap perusahaan jasa-jasa asing semakin besar. Selama ini, defisit transaksi berjalan ditambal dengan arus modal masuk yang cukup besar dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio. Tetapi setelah krisis kepercayaan terjadi, investor asing tidak ingin menanggung kerugian maka ia membawa modalnya ke luar.

Kedua, tingkat akumulasi inflasi Indonesia yang sangat tinggi. Selama kurun waktu empat tahun (1992-1996) inflasi kumulatif sebesar 39,1 persen, sedangkan inflasi Amerika Serikat hanya 14,3 persen. Tetapi pada saat yang sama depresiasi kumulatif rupiah senantiasa ditahan oleh otoritas moneter sebesar 15,57 persen. Oleh karena itu rupiah sebenarnya overvaluasi karena depresiasi ditahan yakni sekitar 9,2 persen. Pemegang otoritas moneter merasa sangat yakin fundamental ekonomi Indonesia sangat baik sehingga mereka tidak perlu melakukan kebijakan devaluasi.

Ketiga, utang luar negeri Indonesia yang terlalu banyak. Kebijakan utang luar negeri yang dilakukan sejak 1965 telah membuat pemerintah terlena dengan risiko yang harus ditanggung di masa depan. Pada pertengahan tahun 1980-an sesungguhnya kita telah harus menghentikan utang luar negeri karena *outflow* negatif. Utang pokok dan cicilan yang harus dibayarkan setiap tahun lebih besar daripada utang yang diterima setiap tahun. Kebijakan utang

pemerintah ini ditiru oleh sektor swasta yang celakanya lagi tidak dikontrol oleh pemerintah. Mereka berbondong-bondong membuat utang luar negeri karena banyak modal negara maju yang menganggur. Mereka tidak membuat perhitungan cara pengembaliannya di kemudian hari.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga mendorong terjadinya krisis moneter. *Pertama*, pergerakan finansial di tiga kutub dunia (AS, Eropa dan Jepang). Pada paruh kedua dekade 1990-an terjadi pergerakan finansial dari Jepang dan Eropa ke AS karena masalah perekonomian yang dialami Jepang dan proses ekonomi-politik penyatuan mata uang Eropa. *Kedua*, institusi finansial berbentuk negara dan lembaga keuangan yang berkembang secara global mengalami perkembangan luar biasa sehingga memiliki otoritas yang lebih besar daripada negara berkembang seperti Indonesia. *Ketiga*, spekulasi yang mengiringi gejolak finansial global.

B. DAMPAK KRISIS MONETER

Krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia menciptakan keresahan yang luar biasa di kalangan rakyat jelata. Mereka yang awam terhadap ekonomi beranggapan bahwa pemerintah Orde Baru telah tidak mampu mengatasi persoalan yang sulit. Di sisi lain rezim Soeharto memang telah melakukan berbagai tindakan represi yang menyakitkan. Atas desakan berbagai pihak, terutama gerakan mahasiswa, rezim Soeharto dijatuhkan.

Pergantian kepemimpinan ini tidak berlangsung mulus. Seperti yang terjadi di masa lalu, pergantian ini diiringi dengan berbagai konflik politik dan ketidakstabilan keamanan. Persoalan yang dihadapi bangsa ini juga ditambah dengan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang korup. Di Indonesia, gejolak politik dapat dengan cepat mengimbas pada gejolak keamanan. Situasi semacam itu tentu saja menambah sulit usaha pemulihan ekonomi Indonesia.

Berbeda dengan negara tetangga yang juga mengalami krisis moneter, Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan karena kerusakan sistemik yang harus dibenahi terlebih dahulu. Memang saat ini stabilitas keamanan lebih kondusif daripada lima tahun yang lalu tetapi ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ekonomi bangsa. Jika negara lain telah keluar dari perawatan dan bimbingan IMF, Indonesia masih tetap menggantungkan diri pada lembaga internasional tersebut. Memang berbagai tanda pemulihan

ekonomi sudah sering muncul, tetapi seakan timbul tenggelam, dan sangat fluktuatif.

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan lambannya Indonesia ke luar dari krisis dibandingkan dengan negara Asia lain. *Pertama*, gelombang krisis di Indonesia telah menimbulkan kerusakan sistemik yang sangat luas dan dalam, bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang sosial, politik, hukum, keamanan dan ketertiban umum. *Kedua*, institusi-institusi yang menjadi pilar kehidupan ekonomi di Indonesia ternyata rapuh, sehingga krisis yang awalnya serupa dengan Malaysia dan Thailand berakhir dengan cara yang berbeda di Indonesia. *Ketiga*, tekad politik atau kesungguhan untuk ke luar dari krisis tidak sekuat negara yang lain. Hal ini tercermin dari tindakan yang dilakukan oleh *vested interest group* di kalangan elit kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan kelompok dan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan pemulihan ekonomi. Selain ketiga alasan tersebut, dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah yang rendah, persaingan antarelit politik, program restrukturisasi ekonomi yang belum berjalan baik dan jeratan utang luar negeri membuat kita tidak hanya harus memperbaiki sistem ekonomi tetapi juga ekonomi politik Indonesia.

C. REFORMASI EKONOMI

Krisis multi dimensi yang dihadapi bangsa Indonesia harus diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam reformasi ekonomi guna menyelesaikan krisis ekonomi. Hal terpenting adalah mengubah paradigma kebijakan ekonomi Indonesia. Jika di masa-masa yang lalu kita sangat mementingkan pertumbuhan ekonomi, sehingga menghalalkan segala cara termasuk memberi kemudahan yang berlebihan terhadap sektor industri besar dan membuat utang yang terlalu besar, maka saat ini yang perlu diperhatikan adalah membangun fundamental perekonomian yang kuat. Fundamental ekonomi semacam itu dapat kita bangun asal kita tidak sepenuhnya tergantung dari bantuan asing tetapi mengeksplorasi dan mengembangkan kekuatan dalam negeri. Pembangunan ekonomi tidak dititikberatkan pada pertumbuhan tetapi pada pemerataan ekonomi. Jika di masa lampau pemerintah hanya memberikan kemudahan pada industri besar saja maka sudah saatnya pemerintah memberi kemudahan pada ekonomi rakyat.

Pemerintah dapat mengambil tindakan yang tegas untuk menentukan sistem kurs. Selama ini pemegang otoritas moneter menerapkan sistem kurs bebas. Pada satu masa sistem semacam ini mungkin saja menguntungkan karena memungkinkan suatu sistem ekonomi yang telah matang untuk masuk ke pasar finansial tingkat global. Tetapi sistem ini sangat riskan untuk negara kecil dan rentan terhadap perubahan sosial-politik di dalam negeri. Kurs tetap dapat diterapkan ketika kondisi eksternal yang rentan sudah dapat diatasi oleh sistem nilai tukar mengambang. Seberapa jauh sistem ini bisa diberlakukan tergantung perkembangan ekonomi internal dan eksternal. Otoritas moneter tidak perlu takut mengambil keputusan dalam keadaan krisis. Persoalannya bukan pada keunggulan sistem tetapi pada ketepatan sistem pada kondisi tertentu (Rachbini, 2001)

Selain kedua tindakan tersebut, kestabilan politik dan keamanan perlu diciptakan untuk melakukan reformasi ekonomi. Setelah mengalami berbagai goncangan, saat ini stabilitas keamanan di tanah air relatif lebih kondusif. Meskipun konflik di beberapa daerah masih belum sepenuhnya dapat diselesaikan namun secara umum kondisi keamanan telah stabil.

Reformasi institusional juga mutlak diperlukan dalam melakukan reformasi ekonomi karena perekonomian dapat berjalan dengan baik hanya jika didukung oleh institusi hukum dan birokrasi yang bersih. Kepastian hukum mutlak diperlukan dalam berbisnis baik bisnis yang menyangkut investasi dalam negeri maupun investasi asing. Birokrasi yang bersih, bebas KKN akan menurunkan ekonomi biaya tinggi, sehingga bisnis dapat berjalan lebih efisien.

Masalah utang luar negeri harus juga menjadi agenda reformasi ekonomi Indonesia. *Outflow* negatif yang saat ini kita alami sangat membebani perekonomian Indonesia. APBN Indonesia yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan sebagian besar justru digunakan untuk membayar utang luar negeri. Akibatnya, Indonesia tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah seharusnya melakukan serangkaian strategi yang jitu untuk memutihkan utang Indonesia karena dengan cara itulah bangsa ini dapat terlepas dari krisis ekonomi.

D. MENUJU EKONOMI KERAKYATAN

Berdasarkan agenda reformasi ekonomi di atas, maka sudah seharusnya kita mengubah paradigma ekonomi yang semula liberal menjadi

berparadigma Pancasila. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan yang berdasar pada Pancasila ini telah kita miliki dan tertuang dalam UUD 1945. Tetapi hingga saat ini tidak ada komitmen yang jelas dari pemerintah untuk melaksanakannya. Indonesia justru terjebak dalam sistem ekonomi liberal yang tidak sesuai dengan keadaan bangsa.

Melalui paradigma ekonomi kerakyatan, kita tidak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi lebih mengutamakan pemerataan ekonomi sehingga fundamental perekonomian berdasar pada kekuatan sendiri bukan mengandalkan bantuan asing. Mengembangkan Sistem Ekonomi kerakyatan tidak berarti menghambat proses keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi, yaitu investasi dan perdagangan bebas. Namun jelas keterlibatan kita dalam perdagangan internasional bukanlah tujuan utama tetapi tujuan sekunder. Tujuan utama pembangunan ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kekuatan ekonomi nasional yang bertumpu pada ekonomi rakyat.

Melalui ekonomi kerakyatan diharapkan praktik KKN dapat dihapuskan karena perekonomian dilakukan, dikuasai dan dikendalikan oleh segenap rakyat. Oleh karena itu, tidak ada salah satu pihak yang dapat mengeksploitasi kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di sisi lain karena berorientasi pada pemerataan ekonomi maka diharapkan semua orang akan mendapatkan kesejahteraan yang relatif sama.

Ekonomi Kerakyatan tidak mengabaikan sektor formal namun lebih memperhatikan, melindungi dan memberikan prioritas pada usaha-usaha ekonomi rakyat yang selama sepuluh tahun terakhir diabaikan. Sektor formal dapat tumbuh dan berkembang dengan meningkatkan kemampuan mereka sendiri bukan semata-mata bergantung pada kemudahan yang diberikan pemerintah seperti yang selama ini mereka nikmati.

Otonomi daerah yang saat ini diterapkan di Indonesia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan ekonomi kerakyatan. Melalui otonomi tersebut diharapkan pembangunan tidak saja berpusat di Jakarta tetapi di seluruh daerah secara bersamaan. Masing-masing daerah dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyatnya masing-masing. Meskipun saat ini otonomi daerah masih berjalan terseok-seok akibat perbedaan persepsi (kepentingan) pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah namun seiring dengan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi diharapkan pelaksanaan otonomi berjalan lebih baik.

Penitikberatan pada pemerataan ekonomi melalui penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan diharapkan akan dapat menghapuskan kemiskinan. Jika sebagian dari kekayaan yang biasanya dinikmati oleh pemilik modal dikelola oleh rakyat banyak maka perekonomian secara umum akan meningkat dan merata. Ekonomi Kerakyatan menitikberatkan pada kesejahteraan sosial melalui perlindungan terhadap kaum yang kalah dalam persaingan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan dan jelaskan penyebab internal krisis moneter yang dialami Indonesia?
- 2) Menurut Anda, prioritas apa yang harus dilakukan untuk melakukan reformasi ekonomi? Jelaskan!
- 3) Jelaskan peranan ekonomi rakyat dalam pemulihan ekonomi nasional!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Penyebab internal krisis moneter di Indonesia antara lain:
 - a. defisit transaksi berjalan yang cenderung membesar,
 - b. tingkat akumulasi inflasi yang sangat tinggi,
 - c. tingginya utang luar negeri.
- 2) Prioritas yang harus dilakukan dalam reformasi ekonomi adalah:
 - a. memperbaiki fundamental ekonomi yang bertitik tolak pada pemerataan,
 - b. melakukan tindakan yang tegas dalam menentukan sistem kurs,
 - c. menciptakan kestabilan politik dan keamanan,
 - d. melakukan reformasi institusi hukum dan birokrasi,
 - e. melakukan pemutihan utang luar negeri.
- 3) Ekonomi kerakyatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi nasional yang bertumpu pada ekonomi rakyat. Dalam memulihkan perekonomian nasional peranan ekonomi rakyat antara lain:

- a. menghapus praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme/KKN,
- b. memberikan prioritas pada usaha-usaha ekonomi rakyat,
- c. mengembangkan potensi rakyat masing-masing daerah pada pelaksanaan otonomi daerah,
- d. menghapuskan kemiskinan.



RANGKUMAN

Krisis moneter yang dialami oleh Indonesia sejak tahun 1997 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah defisit transaksi berjalan Indonesia yang cenderung membesar dari tahun ke tahun, tingkat akumulasi inflasi Indonesia yang sangat tinggi dan utang luar negeri Indonesia yang terlalu banyak sehingga terjadi *outflow* negatif. Faktor eksternal yang mendorong terjadinya krisis moneter adalah pergerakan finansial di tiga kutub dunia (AS, Eropa dan Jepang), terdapat institusi finansial berbentuk negara dan lembaga keuangan yang memiliki otoritas yang lebih besar daripada negara berkembang, dan spekulasi yang mengiringi gejolak finansial global.

Krisis moneter yang dialami oleh Indonesia ternyata tidak dapat diselesaikan dengan negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia dan Thailand karena fundamental ekonomi yang lemah dan gejolak politik. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan reformasi ekonomi antara lain dengan cara: memperbaiki fundamental ekonomi yang bertitiktolak pada pemerataan ekonomi, melakukan tindakan yang tegas dalam menentukan sistem kurs, menciptakan kestabilan politik dan keamanan, melakukan reformasi institusi hukum dan birokrasi, dan melakukan pemutihan utang luar negeri.

Reformasi ekonomi tersebut hanya dapat dilakukan jika para pemegang keputusan ekonomi mengubah paradigma liberal menjadi paradigma ekonomi kerakyatan yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Melalui Sistem Ekonomi kerakyatan diharapkan pemerataan ekonomi dapat berjalan sehingga fundamental ekonomi bertumpu pada kemampuan sendiri bukan pada bantuan asing. Lebih lanjut kemiskinan dan praktik KKN dapat ditekan karena semua pihak dilibatkan dalam perekonomian.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tanda-tanda krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997/1998 antara lain
 - A. apresiasi nilai tukar
 - B. inflasi rendah
 - C. suku bunga tinggi
 - D. kontraksi pertumbuhan ekonomi

- 2) Kesepakatan yang memaksa pemerintah Indonesia untuk mengikuti Program Penyesuaian Struktural IMF adalah
 - A. *Letter of Credit*
 - B. *Letter of Intent*
 - C. *Memorandum of Intent*
 - D. *Memorandum of Structural Program*

- 3) Salah satu upaya pemerintah untuk menyetatkan perbankan pasca krisis moneter 1997/1998 dengan menerbitkan obligasi (surat utang) kepada perbankan disebut
 - A. rekapitalisasi perbankan
 - B. restrukturisasi perbankan
 - C. likuidasi perbankan
 - D. akuisisi perbankan

- 4) Salah satu faktor perlunya reformasi ekonomi adalah adanya tatanan ekonomi di mana hanya segelintir elit dan pengusaha besar yang menguasai dan mendominasi perekonomian, yang disebut
 - A. demokrasi ekonomi
 - B. konglomerasi
 - C. liberalisasi
 - D. kapitalisasi

- 5) Salah satu hal yang mendukung daya tahan ekonomi rakyat dalam menghadapi krisis adalah
 - A. ketidaktergantungan pada utang luar negeri
 - B. ketergantungan pada bahan baku impor
 - C. terjadinya *capital outflow*
 - D. penggunaan bahan baku luar negeri

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) B
- 3) B
- 4) B
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) D
- 2) B
- 3) A
- 4) B
- 5) A

Daftar Pustaka

- Deliarnov. (1995). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Utama.
- Gregory Stuart. (1982). *Comparative Economic System*. Boston.
- Hamid, Edy Suandi. (2005). *Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamid, Edy Suandi. (2004). *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press.
- Hudiyanto. (2004). *Ke luar dari Ayun Pendulum Kapitalisme-Sosialisme*. Yogyakarta: UMY Press.
- Hudiyanto. (2001). *Ekonomi Indonesia: Sistem dan Kebijakan*. Yogyakarta: PPE UMY.
- Ma'arif, Syafi'i, Dr Candra Muzaffar dan Kapitalisme 3 K, dalam *majalah Prospek*, FIS-UNY, edisi Desember 2004.
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Mubyarto. (2002). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE.
- Mubyarto. (2000). *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Robinson, Joan. (1979). *Aspects of Development and Underdevelopment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wayne, Ellwood. (2001). *No-Nonse Guide to Globalization*. Oxford: New International Publication